



**PENERAPAN TUNTUTAN PIDANA
DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM
DELIK KORUPSI PEMERASAN DALAM JABATAN**

TESIS

AGUS KURNIAWAN

1810622090

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2022**



**PENERAPAN TUNTUTAN PIDANA
DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM
DELIK KORUPSI PEMERASAN DALAM JABATAN**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

AGUS KURNIAWAN

1810622090

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2022**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : **Agus Kurniawan**
NPM/NIM : 1810622090
Tanggal :

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 4 Maret 2022

Yang Menyatakan,



(Agus Kurniawan)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Agus Kurniawan**
NPM/NIM : 1810622090
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

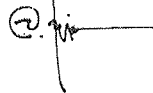
Penerapan Tuntutan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Delik Korupsi Pemerasan Dalam Jabatan

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Maret 2022

Yang menyatakan,



(Agus Kurniawan)

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh :

Nama : **Agus Kurniawan**
NPM/NIM : 1810622090
Program Studi : Magister Hukum
Judul Tesis : Penerapan Tuntutan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Delik Korupsi Pemerasan Dalam Jabatan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Penguji dan Pembimbing serta telah diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.

Ketua Penguji

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., MH.

Penguji I

Prof. Dr. Agus Surono, S.H., MH.

Penguji II/Pembimbing



Dr. Abdul Halim M.Ag

Dekan

Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M.

Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal ujian :
Bulan :
Tahun :

PENERAPAN TUNTUTAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM DELIK KORUPSI PEMERASAN DALAM JABATAN

AGUS KURNIAWAN

Abstrak

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan undang-undang sebelumnya, salah satunya yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, namun dalam pelaksanaannya ancaman pidana minimum khusus berbenturan antara Asas Kepastian Hukum dengan Asas Keadilan dan Asas Kemanfaatan Hukum, sedangkan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan juga harus mampu mewujudkan ketertiban hukum, kepastian hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma seperti keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Tulisan ini menjelaskan Penuntut Umum dapat menerapkan tuntutan pidana di bawah minimum khusus dalam delik korupsi pemerasan dalam jabatan, berdasarkan deskresi penuntutan dan teori kontemporer tujuan pemidanaan. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian normatif dengan menganalisis data sekunder. Penelitian ini menjelaskan landasan teori atau kriteria untuk dapat diterapkannya tuntutan pidana di bawah minimum khusus dalam delik korupsi pemerasan dalam jabatan.

Kata Kunci : Tuntutan Pidana, Minimum Khusus, Tindak Pidana Korupsi

APPLICATION OF CRIMINAL CLAIMS BELOW THE SPECIFIC MINIMUM IN OFFENSES CORRUPTION BLACKMAIL IN OFFICE

AGUS KURNIAWAN

Abstract

In order to achieve a more effective goal of preventing and eradicating corruption, Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption as already stated in the Law of the Republic of Indonesia amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 containing different criminal provisions with previous laws, one of which was to determine a specific minimum criminal threat, but in its implementation a special minimum criminal threat that clashes between the principle of legal certainty with the principle of justice and the principle of benefit Law, while the Public Prosecutor in carrying out the prosecution must also be able to realize certainty, the applicable law, justice and truth based on the law and observing religious norms, politeness, and decency, also must have human values, law, and justice that live in society, as observed Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. This paper explains that the Public Prosecutor can apply criminal charges below the specific minimum in the corruption offense of extortion in office, based on the prosecution's discretion and contemporary theory of sentencing purposes. The type of research used in this paper is a type of normative research which analyzes secondary data. This study explains the theoretical basis or criteria for the application of criminal charges under the special minimum in corruption offenses, extortion in office.

Keywords : Criminal Charge, Special Minimum, Criminal Act of Corruption

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga tesis ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini yang dilaksanakan sejak tanggal 26 Agustus 2020 adalah Penerapan Tuntutan Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Delik Korupsi Pemerasan Dalam Jabatan.

Terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. **Prof. Dr. Erna Hermawati, Ak, CPMA, CA** selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. **Dr. H. Abdul Halim, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. **Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LLM** selaku Kaprodi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, yang telah mendukung penulis menyelesaikan tesis ini.
4. **Prof. Dr. Agus Surono, SH, MH** selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat.
5. **Dr. Heru Sugiono, SH, MH** dan **Dr. Slamet Tri Wahyudi, SH, MH** selaku penguji tesis yang telah banyak memberikan saran dan masukan yang sangat bermanfaat.
6. Ibu **Yulia Winarti** dan Bapak **Satino, S.Sos, MH**, yang telah membantu penulis menyelesaikan administrasi selama pembelajaran perkuliahan.
7. **Dr. Eka Nugraha, SH, MH** selaku Ketua Tim Penuntut Umum, **Pantono Rono Widjaya, SH** dan **Erlangga Jayanegara, SH, MH** bersama penulis selaku Anggota Tim Penuntut Umum berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Serang Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Srg tanggal 1 Oktober 2019, yang telah memberikan kesempatan penulis mengangkat perkara tersebut menjadi tema penulisan tesis ini.
8. **MUHAMMAD FAUDZI ARSANI, SH**, calon Jaksa pada Kejaksaan Negeri Takalar, yang sudah membantu penulis dalam editing turnitin.

Disamping itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada kedua orang tua saya, **Papa Kiswan & Mama Iyah** serta Istri tercinta **Neny Angraeny, SE** dan putera pertama kami tersayang **Haykal Yahya Kurniawan** serta keluarga besar Kiswan dan keluarga besar Torejo, yang tidak henti-hentinya memberikan penulis semangat dan doa, menyelesaikan proposal tesis ini ditengah kondisi Pandemi Covid-19 sehingga tertunda pelaksanaannya selama 4 (empat) semester serta mutasi tugas ke luar daerah Jawa. Penulis juga sampaikan terima kasih kepada teman-teman Magister Hukum Angkatan 2018 yang telah telah memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.

Jakarta, 4 Maret 2022

Penulis


Agus Kurniawan, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Perumusan Masalah	10
I.3. Tujuan Penelitian	10
I.4. Manfaat Penelitian	10
I.5. Kerangka Teoritis	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
II.1. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia	20
II.1.1. Kewenangan Kejaksaan dan Jaksa Agung	24
II.1.2. Hubungan Kejaksaan dengan Kekuasaan Kehakiman	28
II.1.3. Jaksa atau Penuntut Umum dalam Guidelines on The Role of Prosecutor 1990 dan International Association of Prosecutors Standards of Professional Responsibility and Statement of The Essential Duties and Rights of Prosecutors	30
II.1.4. Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	32
II.2. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi	35
II.2.1. Delik yang diatur dalam Undang-Undang Korupsi	37
II.2.2. Sistem Pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Korupsi ...	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
III.1. Jenis Penelitian	43
III.2. Pendekatan Masalah	43
III.3. Sumber Data	44
III.4. Cara Pengumpulan Data	45
III.5. Teknis Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
IV.1. Tujuan Pemidanaan	48
IV.1.1 Teori Absolut atau Teori Pembalasan	49
IV.1.2 Teori Relatif atau Teori Tujuan	50
IV.1.3. Teori Gabungan	51
IV.1.4. Teori Kontemporer	53
IV.2. Keadilan Restoratif	55

IV.3. Kebijakan Penuntutan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Republik Indonesia	58
IV.3.1. Penerapan dan Pertimbangan Tuntutan Pidana di Bawah Minimum Khusus dalam Delik Korupsi Pemerasan Dalam Jabatan	62
IV.3.2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor : 6/Pid.Sus- TPK/2019/PN.Srg tanggal 1 Oktober 2019	70
 BAB V PENUTUP	 73
V.1. Kesimpulan	73
V.2. Saran	75
 DAFTAR PUSTAKA	 76
RIWAYAT HIDUP	